

RENCANA KERJA
KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN PURI

Jl. Jend. Sudirman No. 107 Mojokerto 61363

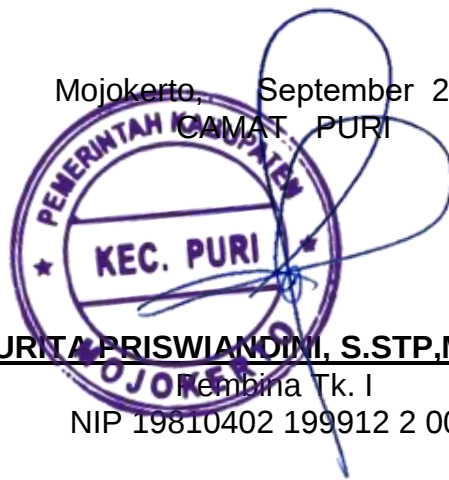
KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Puri Tahun Anggaran 2025. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2025 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra), yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) ini dan semoga Allah SWT. senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2024
CAMAT, PURI



NALURITA PRISWIANDINI, S.STP,M Med.Kom

Pembina Tk. I

NIP 19810402 199912 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Yang Lalu	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Kec. Puri	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	24
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	39
BAB III Tujuan dan Sasaran	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	40
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	40
3.3 Program dan Kegiatan	41
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	51
BAB V Penutup	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Puri merupakan dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 Kabupaten Mojokerto yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Mojokerto berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

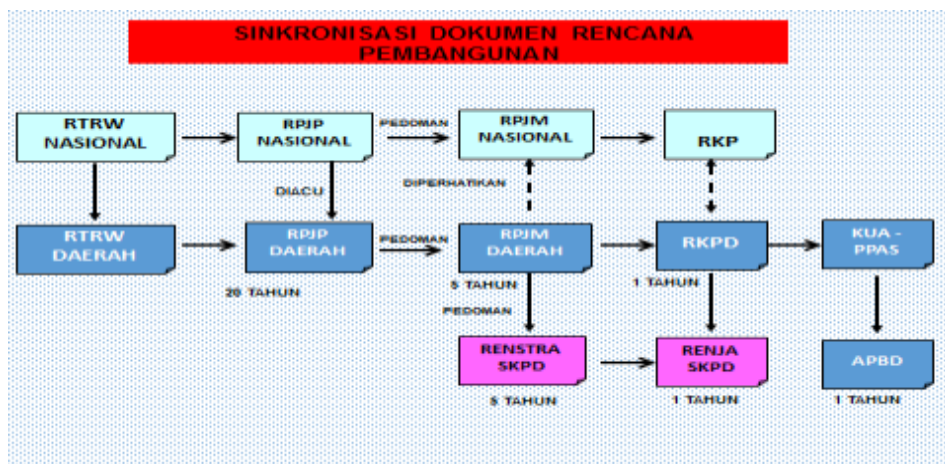
Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Puri yang selanjutnya disingkat dengan Renja Kecamatan Puri adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Puri Tahun 2021 – 2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Rencana Kerja merupakan alat untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang pencapaian targetnya sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan harus dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan.

Kedudukan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renja Kecamatan Puri yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Mojokerto dan kemudian menjadi pedoman penyusunan RKA Kecamatan Puri.

Penyusunan Renja Kecamatan Puri tahun 2025 dimulai dari penyusunan Ranwal Renja Tahun 2025 kemudian menjadi Rancangan Renja Tahun 2025, kemudian penyusunan Rankhir Ranja Tahun 2025 dan terakhir menjadi Renja Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi JawaTimur;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 04 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomer 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026
27. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
28. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 44 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
29. Surat Keputusan Camat Puri nomor 188/005/416-311/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Renja Kecamatan Puri Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penjabaran penyelenggaraan perencanaan pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, sehingga para pelaksana pembangunan daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah agar pembanguann di Kabupaten Mojokerto khususnya di Kecamatan Puri sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan dilakukan secara terukur, terarah dan terpadu secara konsisten, agar berhasil sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Puri ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puri. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renja ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam

merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2025 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Renja Perangkat Daerah serta keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perang dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah , dengan Renja BKPP serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RenjaPerangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan sebagai landasan menyusun indikasi rencana program lima dan satu tahunan.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Sajian Tabel TC-29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Sajian Tabel TC-30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan Uraian Mengenai :

Tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap RKPD

Berisikan Uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

d. Sajian Tabel TC-31 Review Terhadap RKPD

2.5 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang perumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2 Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah

Pada Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisi penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan antara lain :

- Jumlah program dan jumlah kegiatan
- Lokasi program/kegiatan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya

Sajian Tabel TC 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bahwa dalam penyusunan Program dan Kegiatan di Renja Perangkat Daerah ini, kami mengacu dan berpedoman pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Perangkat Daerah ini kami kerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Sebagaimana yang tertuang dalam: “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.” Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Puri pada tahun 2024 pada umumnya tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagaimana table 2.1 berikut::

Tabel 2.1
Realisasi Anggaran Kecamatan Puri

NO	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	ANGGARAN TAHUN 2024		Present ase (%)
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	-	84,95	99,94
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program yang tercapai sesuai target(%)	100%	-	100%	100
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6.000.000,00	5.765.000,00	96,08
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)	11	5.000.000,00	4.862.000,00	97,24
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah(%)	93,35	-	95,75	102,57
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN(orang)	17	2.245.923.000,00	2.146.672.724,00	95,58
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN(Dokumen)	43	3.000.000,00	2.795.086,00	93,17
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IP ASN Perangkat DAERAH	88,65	0	77,46	87,38
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai kebutuhan(%)	100	-	100	100,00

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1.000.000,00	9.859.400,00	985,94
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	0	0,00	0,00	0,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (paket)	4	28.500.000,00	27.878.000,00	97,82
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	12.500.000,00	12.498.800,00	99,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan (dokumen)	1	3.200.000,00	3.000.000,00	93,75
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	4	30.000.000,00	28.500.000,00	95,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD(Laporan)	12	18.150.000,00	18.150.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai kebutuhan(%)	100	135.340.300,00	126.045.681,00	93,13
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	55.340.300,00	53.945.729,00	97,48
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	80.000.000,00	72.099.952,00	90,12

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik(%)	100	65.750.000,00	63.100.520,00	95,97
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	2	48.750.000,00	48.530.000,00	99,55
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	5.000.000,00	2.931.170,00	58,62
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	12.000.000,00	11.639.350,00	96,99
II.	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan(%)	100%	25.181.100,00	23.487.600,00	93,27
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan (pelayanan)	1.050	25.181.100	23.487.600,00	93,27
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada urusan Pemerintahan (laporan)	30	25.181.100,00	23.487.600,00	93,27
III.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti(%)	100%	253.036.900,00	249.885.250,00	98,75
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (fasilitasi)	30	253.036.900	249.885.250,00	98,75

	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (dokumen)	9	53.296.200,00	52.608.500,00	98,71
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (dokumen)	5	24.761.400,00	24.708.400,00	99,79
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (dokumen)	5	61.386.000,00	60.995.350,00	99,36
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan (Dokumen)	11	113.593.300,00	111.573.000,00	98,22
JUMLAH				2.841.581.300	2.720.873.805	95,75

Dari data table di atas dapat diketahui pencapaian kinerja secara umum terlaksana dengan baik 95,75 %, dari Pengeluaran sebesar Rp 2.841.581.300,00 terealisasi sebesar Rp 2.720.873.805,00 sisa anggaran Rp 120.707.495,00

Sisa anggaran yang tidak terserap maksimal adalah anggaran gaji dan TPP karena ASN yang purna tugas di Kecamatan Puri

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program dan Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

**TABEL 2.2 (T.C 29 pada Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85	84,23	84	84,87	101	85	84.95	99,94%
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	100	7 Inovasi	7 Inovasi	100%

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target	100%	100	100	100	100	100%	100%	100%
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	7 dokumen	100 %
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang dapat tersusun	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	7 dokumen	100	7 dokumen	7 dokumen	100 %
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Realisasi Anggaran PD yang dapat tercapai	92%	81%	82	92,7	113	93,35%	95,75	100%
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah dokumen pemenuhan gaji dan tunjangan	38 laporan	38 laporan	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	100%	17 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	100%
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan keuangan bulanan dan tahunan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	60 laporan	100%	60 laporan	60 laporan	100%
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks profesionalitas ASN Kecamatan Puri	83	66	74	88,65	100%	88,65	77,46	87,38%

7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas PNS serta perlengkapannya yang dapat terpenuhi	30 stel	30 Stel	-	-	-	-	-	-
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perkantoran	90%	100 %	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Laptop, PC, Lcd, Printer, dll.	1 paket	1 paket	5 paket	5 paket	100	1 paket	1 paket	100%
7.01.01.2.06.04	Penyediaan bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pemenuhan logistik kantor	12 bulan	1 Paket	12 bulan	12 bulan	100	4 Paket	4 paket	100%
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan kertas, kop, amplop, kop, lembar disposisi	1 paket	1 Paket	2 paket	2 paket	100	2 paket	2 paket	100%

7.01.01.2.06.06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu pemenuhan bahan bacaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah waktu pemenuhan bahan/material	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	4 paket	4 paket	100%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan biaya perjalanan dinas	12 bulan	12 bulan	12 laporan	12 laporan	100	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	2 orang	2 orang	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan	100%	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah								
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara selama setahun	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100	2 unit	2 unit	100%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dan berfungsi dengan baik	2 unit	2 unit	1 unit	1 unit	100	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara dengan baik	5 unit	5 unit	1 Unit	1 Unit	100	10 unit	10 unit	100%
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang	Prosentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Dilimpahkan kepada Camat	terlayani sesuai Standar Pelayanan								
7.01.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Prosentase Pelayanan Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	0	0	0	0	0	0
		Prosentase Pelayanan Non Perizinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase rekomendasi, Fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	16 Desa	16 desa	26 dokumen	26 dokumen	100	30 dokumen	30 dokumen	100%

	Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintah Desa								
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	16 Desa	16 desa	9 dokumen	9 dokumen	100	9 dokumen	9 dokumen	100%
7.01.06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	16 Desa	16 desa	7 dokumen	7 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100%
7.01.06.2.01.11	Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16 Desa	16 desa	5 dokumen	5 dokumen	100	5 dokumen	5 dokumen	100%
7.01.06.2.01.12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	16 Desa	16 desa	5 dokumen	5 dokumen	100	11 dokumen	11 dokumen	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, maka kecamatan adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan di Kabupaten Mojokerto, sehingga mendorong untuk turut serta mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mojokerto.

Keberhasilan suatu perencanaan dapat dilihat dengan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan perencanaan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan didukung sejumlah kebijakan yang bersifat pengaturan untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah provinsi dan perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto memiliki sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah disesuaikan dengan capain indicator Kepala Daerah pada Misi 3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
KECAMATAN PURI

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	90	91	91,50	92
	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal		IKM Kecamatan	83	90	91	91,50	92
		Program Penunjang Urusan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83	84	85	85	85.5

		Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	-	7 inovasi	7 inovasi	7 inovasi	7 inovasi
			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81%	90%	91%	92%	93%
			IP ASN Perangkat Daerah	60	81	82	83	84
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : Dokumen Renstra Kecamatan Puri periode 2021-2026

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.4 (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

Tabel 2.4 (T-C. 30 Pada Lampiran Permendagri 2017)
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

NO	Indikator	SPM/ Stand art Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Nilai IKM			90	91	91,50	92	93,57	93,70	93,77	94	Sangat baik
	Persentase pelayanan yang terlayani sesuai standar pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Baik
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			84	85	85	85,5	84,87	84,95	85	86	Memuaskan
	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah			90%	91%	92%	93%	93,32	95,75	96%	96%	Baik
	IP ASN Perangkat Daerah			81	82	83	84	88,85	77,46	81	82	Sedang
	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan			7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	7 Inovasi	Baik

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi Kecamatan Puri diantaranya dipengaruhi oleh kondisi internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

a. Kondisi Internal

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek : Perjanjian, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan , Pengawasan, Fasilitas, Penetapan, Penyelenggaraan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Kondisi internal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yaitu faktor kekuatan dan faktor kelemahan organisasi yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Puri

- Faktor Kekuatan Organisasi

1. Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan , tugas pokok, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto.
2. Aparat Kantor Kecamatan Puri bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3. Pola kerja di Kantor kecamatan Puri yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas – tugas pada Kantor Kecamatan Puri;
6. Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang memadai.

- Faktor Kelemahan Organisasi

1. Jumlah staf yang kurang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas yang semakin terbatas :
2. Belum optimalnya kualitas sumber daya pegawai;
3. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja.
4. Belum tersedianya data kegiatan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.

6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.

b. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis karena berada pada lingkungan eksternal organisasi, maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Kecamatan Puri namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi.

Dua faktor dari lingkungan eksternal organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi antara lain :

- Faktor Peluang Organisasi

1. Tersedianya potensi industri, UKM sumber daya alam, pertanian peternakan serta pariwisata,
2. Tingginya peluang pasar.
3. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan,pejabat struktural dan para staf kecamatan sehingga tercipta suasana kerja dan pelayanan yang nyaman dan kondusif
4. Semakin tingginya partisipasi Masyarakat terhadap pembangunan

Faktor Tantangan Organisasi

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana .
2. Luasnya wilayah yang harus dijangkau dalam pelayanan.
3. Kurang adanya perhatian pada pentingnya informasi yang terdapat pada masyarakat.
4. Tuntutan masyarakat akan kecepatan sebuah pelayanan.
5. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
6. Insfrastruktur jalan maupun drainase di tingkat Kecamatan maupun desa perlu diperbaiki;
7. Sarana prasarana untuk fasilitas umum seperti sarana olah raga untuk masyarakat kurang.

Dengan adanya permasalahan dan hambatan yang ada, dan melihat kondisi masyarakat Kecamatan Puri yang heterogen maka ini merupakan peluang dan tantangan bagi OPD Kecamatan Puri untuk dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal di tahun-tahun berikutnya.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan RKPD Tahun 2025 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat kelurahan, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik)

Restrukturisasi Program/Kegiatan sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Organisasi Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Selengkapnya sebagaimana tabel 2.5 (T-C 31) berikut :

Tabel 2.5 (T-C. 31 Dalam Permendagri 2017)
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Propinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

RANCANGAN AKIR RKPD							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
N O	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM KEGATAN	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	CATA TAN PENT NIG
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Puri	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (A)	2.495.923.000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Kec. Puri	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86(A)	2.741.447.000	
				Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi				Jumlah Inovasi yang terinternalisa si dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi		
	7.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100,00%	10.000.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	100,00%	5.000.000	
	7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	5.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 dokumen	2.500.000	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
		<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan</i>			<i>1 Paket</i>	<i>3.000.000</i>	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan</i>			<i>1 Paket</i>	<i>1.600.000</i>	

		<i>Cetak</i>					<i>Cetak</i>					
		<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>			<i>20 OH</i>	<i>2.000.000</i>	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>			<i>9 OH</i>	<i>900.000</i>	
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	2.500.000	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
		<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>			<i>2 Paket</i>	<i>1.000.000</i>	<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</i>			<i>10 set</i>	<i>1.600.000</i>	
		<i>Belanja Mamin Rapat</i>			<i>50 kotak</i>	<i>2.500.000</i>	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>			<i>9 OH</i>	<i>900.000</i>	
		<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>			<i>15 OH</i>	<i>1.500.000</i>						
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	84,00%	2.164.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	82,00%	2.491.447.000	
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Puri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / Bulan	2.164.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Kec. Puri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / Bulan	2.491.447.000	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>			<i>15 Orang / Bulan</i>	<i>2.164.000.000</i>	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>			<i>15 Orang / Bulan</i>	<i>2.491.447.000</i>	
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan		-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi		-	

				Tugas ASN					Pelaksanaan Tugas ASN			
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
						-					-	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Puri	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	82	-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec. Puri	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	82	-	
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Puri	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kec. Puri	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-	
	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Puri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kec. Puri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	-	
						-					-	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90,00%	128.733.300	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Puri	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	90,00%	83.560.000	
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	3.000.000	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					

		Stopkontak, Lampu LED			1 paket	5.000.000	Stopkontak, Lampu LED			1 paket	3.000.000	
	7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 unit	40.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 unit	21.160.000	
		Rincian :					Rincian :					
		Mebel /Kursi			43 buah	21.478.500	Kursi Rapat			30 Unit	21.160.000	
		Leptop			1 unit	8.600.000						
		PC Unit			1 unit	9.921.500						
	7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Puri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000	
		Rincian :					Rincian :					
		Honor PPTK			2 OB	1.010.000	Honor PPTK			1 OB	1.010.000	
		Belanja makanan dan minuman rapat			12 Paket	21.900.000	Belanja makanan dan minuman rapat			12 Paket	13.000.000	
		Belanja Jamuan Rapat			12 Paket	12.090.000	Belanja Mamin Jamuan Tamu			12 Paket	5.990.000	
	7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Puri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Puri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	3.500.000	
		Rincian :					Rincian :					
		Banner dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor/Bahan Cetak			2 Paket	5.000.000	Foto copy, Cetak Map Dinas, Cetak Banner			2 Paket	3.500.000	
	7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	2.700.000	
		Rincian :					Rincian :					

		<i>Koran</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>3.000.000</i>	<i>Koran</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>2.700.000</i>	
	7.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Puri	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	30.733.300	Penyediaan Bahan / Material	Kec. Puri	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket	24.200.000	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
		<i>Honor PPTK</i>			<i>1 OB</i>	<i>1.010.000</i>	<i>Honor PPTK</i>			<i>1 OB</i>	<i>1.010.000</i>	
		<i>ATK/Kertas/bahan komputer/benda pos</i>			<i>12 paket</i>	<i>29.723.300</i>	<i>ATK/Kertas/bahan komputer/benda pos</i>			<i>12 paket</i>	<i>23.190.000</i>	
	7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	10.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	9.000.000	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
		<i>SPPD luar kota</i>			<i>5 OH</i>	<i>2.000.000</i>	<i>SPPD luar kota</i>			<i>4 OH</i>	<i>1.500.000</i>	
		<i>SPPD dalam kota</i>			<i>80 OH</i>	<i>8.000.000</i>	<i>SPPD dalam kota</i>			<i>75 OH</i>	<i>7.500.000</i>	
	7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Puri	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	90,00%	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Puri	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	90,00%	-	
	7.01.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Puri	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Sekcam, 2 KasubBag, 5 Kasi)	-	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Puri	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Sekcam, 2 KasubBag, 5 Kasi)	-	-	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					

		-			-		-		-			
	7.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Kec. Puri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	Pengadaan Mebel	Kec. Puri	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	
		<i>Rincian :</i>			-	-	<i>Rincian :</i>			-	-	
	7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puri	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100,00%	131.530.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Puri	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100,00%	123.530.000	
	7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	51.530.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan	51.530.000	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
		<i>Honor PPTK</i>			<i>1 OK</i>	<i>1.010.000</i>	<i>Honor PPTK</i>			<i>1 OK</i>	<i>1.010.000</i>	
		<i>Listrik Kantor</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>43.405.500</i>	<i>Listrik Kantor</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>43.405.500</i>	
		<i>PDAM</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>7.114.500</i>	<i>PDAM</i>			<i>12 Bulan</i>	<i>7.114.500</i>	
	7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	80.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Puri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
		<i>Honor PPTK</i>			<i>8 OK</i>	<i>8.080.000</i>	<i>Honor PPTK</i>			<i>3 OK</i>	<i>3.030.000</i>	
		<i>Tenaga Administrasi Kantor, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan (6</i>			<i>6 orang</i>	<i>71.920.000</i>	<i>Tenaga Administrasi Kantor dan Tenaga Keamanan(5 orang)</i>			<i>5 orang</i>	<i>68.970.000</i>	

		orang)										
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Puri	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	90,00%	61.659.700	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Puri	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	90,00%	37.910.000	
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Puri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	48.750.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Puri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	31.250.000	
		Rincian :					Rincian :					
		Honor PPTK			1 OK	1.010.000	Honor PPTK			1 OK	1.010.000	
		BBM			2009 liter	37.990.000	BBM			970 liter	18.333.000	
		Service Kendaraan Dinas (mobil)			1 Unit	9.750.000	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional			1 Unit	9.750.000	
							pajak			1 Tahun	2.157.000	
	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	5.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Puri	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	3 Unit	3.000.000	
		Rincian :					Rincian :					
		Pemeliharaan halaman gedung kantor			250 m2	2.500.000	perabot kantor			1 paket	3.000.000	
		perabot kantor			1 paket	2.500.000						

	7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.Puri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit	7.909.700	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Puri	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	10 Unit	3.660.000	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
		<i>Service Peralatan Kantor , Printer , Laptop/PC, AC dll</i>			<i>10 unit</i>	<i>7.909.700</i>	<i>Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll</i>			<i>10 unit</i>	<i>3.660.000</i>	
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.Puri	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100,00%	35.200.000	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec.Puri	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100,00%	19.000.000	
	7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Puri	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	1.050 pelayanan	35.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Puri	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	1.050 pelayanan	19.000.000	
	7.01.02. 2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	-	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	-	-	
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
	7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non	Kec. Puri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	30 Laporan	35.200.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non	Kec. Puri	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan	30 Laporan	19.000.000	

		Perizinan					Perizinan		Pemerintahan			
		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
		<i>Honor PPTK</i>			<i>2 OB</i>	<i>2.020.000</i>	<i>PPTK</i>			<i>1 OB</i>	<i>1.010.000</i>	
		<i>Koordinasi dan Konsultasi bidang pelayanan</i>			<i>1 Laporan</i>	<i>1.500.000</i>	<i>Forum Konsultasi Publik</i>			<i>1 Kegiatan</i>	<i>3.072.100</i>	
		<i>Pembinaan / Peningkatan Kapasitas Pegawai</i>			<i>22 pegawai</i>	<i>21.868.100</i>	<i>Peningkatan Kapasitas Pelayanan</i>			<i>22 pegawai</i>	<i>14.340.700</i>	
		<i>Mamin Tamu Pelayanan</i>			<i>1 paket</i>	<i>9.247.400</i>	<i>Perabot Kantor</i>			<i>1 paket</i>	<i>577.200</i>	
		<i>Perabot Kantor</i>			<i>1 Laporan</i>	<i>564.500</i>						
	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100,00%	229.800.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100,00%	181.000.000	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Dokumen	229.800.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23 Dokumen	181.000.000	
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	69.030.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Puri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10 Dokumen	40.000.000	

		<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
		<i>PPTK</i>			<i>4 OB</i>	<i>4.040.000</i>	<i>Honor PPTK</i>			<i>3 OB</i>	<i>3.030.000</i>	
		<i>Asistensi penyusunan RKP Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 desa</i>	<i>1.614.100</i>	<i>Evaluasi RAPERDES APBDES</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 berkas</i>	<i>2.209.400</i>	
		<i>Bintek penatausahaa n aset desa</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 desa</i>	<i>4.414.100</i>	<i>Evaluasi RAPERDES Pertanggungja waban APBDES</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 berkas</i>	<i>1.614.100</i>	
		<i>Bintek Penatausahaa n keuangan desa</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>4.414.100</i>	<i>Penilaian Monev Lomba Aadmiistrasi Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 dea</i>	<i>18.814.100</i>	
		<i>Evaluasi raperdes APBDES dan PAPBDES</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 berkas</i>	<i>3.314.100</i>	<i>Konferensi Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>4 kali</i>	<i>10.204.200</i>	
		<i>Evaluasi raperdes pertanggungja waban APBDES</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 berkas</i>	<i>1.714.100</i>	<i>Asistensi Penyusunan RKP Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 desa</i>	<i>1.414.100</i>	
		<i>Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>5.914.100</i>	<i>Monev Pelaksanaan Realisasi APBDES Semester I</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 berkas</i>	<i>2.714.100</i>	
		<i>Konferensi dinas</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>4 kali</i>	<i>12.314.100</i>						
		<i>Monev pelaksanaan realisasi APBDES semester 1</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 berkas</i>	<i>4.514.100</i>						
		<i>Pembinaan kepala dusun</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 desa</i>	<i>6.649.000</i>						
		<i>Penilaian monev lomba desa</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>16 desa</i>	<i>20.128.200</i>						

7.01.06. 2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dokumen	20.019.680	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7 Dokumen	17.000.000	
	<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
	<i>PPTK</i>			<i>2 OB</i>	<i>2.020.000</i>	<i>honorarium PPTK</i>			<i>1 OB</i>	<i>1.010.000</i>	
	<i>Musrenbang</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>10.321.200</i>	<i>monitoring dan evaluasi (BK Desa)</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>2.272.100</i>	
	<i>Musrebang Khusus (Tematik)</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>3.569.080</i>	<i>Musrenbang Kecamatan</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>10.175.050</i>	
	<i>Pramusrebang</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>3.509.400</i>	<i>Musrenbang tematik</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>3.542.850</i>	
	<i>Koordinasi dan Konsultasi Bidang Pembangunan Desa</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>600.000</i>						
7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	46.980.200	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	37.000.000	
	<i>Rincian :</i>					<i>Rincian :</i>					
	<i>Honor PPTK</i>			<i>4 OB</i>	<i>3.030.000</i>	<i>Honor PPTK</i>			<i>2 OB</i>	<i>2.020.000</i>	
	<i>Honorarium Tim Forkopimca (2 org X 12 X 750.000)</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>18.000.000</i>	<i>Honor muspika</i>		<i>Jumlah Dokumen</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>13.500.000</i>	

		Apel Linmas /Lomba/upacara / lomba PHBN (Tasyakuran dan Upacara HUT RI)		Jumlah Dokumen	2 Dokumen	22.750.200	sppd pemantauan wilayah		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.600.000	
		Koordinasi dan Konsultasi bidang Trantib		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3.200.000	kegiatan faslilitasi penyelenggaraa n ketentraman dan ketertiban umum		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	3.110.625	
							Tayakuran dan Upacara HUT RI		Jumlah Dokumen		16.769.375	
7.01.06.2.01.12		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	93.770.120	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Puri	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen	87.000.000	
		Rincian : PPTK			4 OB	4.040.000	Rincian : Honorarium PPTK			4 OB	3.030.000	
		Koordinasi dan Konsultasi dengan Tokoh Agama dan Masyarakat		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	7.995.200	SAPI QURBAN		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	44.215.700	
		Hibah Sapi		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	39.705.700	doa bersama toga		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	6.738.100	
		Lomba PKK		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.668.800	lomba pkk		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	9.518.800	
		Pelatihan PKK		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	12.287.500	pelatihan PKK		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	8.739.100	

		Pleno PKK		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	11.158.800	Pleno PKK		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	7.614.100	
		Pembinaan Pemerdayaan Kartar		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	4.914.120	Pemberdayaan LKD		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	7.144.200	
		Koordinasi dan Konsultasi Bidang Kemasyarakatan		Jumlah Dokumen	1 Dokumen	1.000.000						
JUMLAH TOTAL						2.760.923.000					2.941.447.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan merupakan sebuah OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam hal pelayanan publik sehingga hampir semua kegiatan selalu berhubungan langsung kepada masyarakat baik melalui pembinaan pemerintah desa, Lembaga, organisasi maupun masyarakat untuk dapat mewujudkan visi dan misi kabupaten Mojokerto yang diemban oleh Kecamatan khususnya misi ke 3.

Pelaksanaan Pemberian Sapi Qurban dilaksanakan melalui program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan dalam bentuk pemberian barang yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk sapi Qurban, dikarenakan tidak adanya usulan dari masyarakat melalui SIPD untuk dilaksanakan oleh Kecamatan Puri sebagai SKPD pelaksana sebagaimana Tabel TC 3.2 dibawah ini :

Tabel T-C. 32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan
Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
Tahun 2025

Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi	Volume	Pagu (Rp)	OPD penanggung jawab
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Puri	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	1 Ekor Hewan Kuran Idul Adha	Hibah sapi untuk 1 Desa	Kecamatan Puri

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan nasional untuk lebih meningkatkan pelayanan umum pada semua masyarakat di semua lapisan maka semua program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Puri ditujukan untuk meningkatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berintegritas, Akutanbel, Bersih, Transparan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.
Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Nilai IKM	82	84	90	91	91,50	92
		Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Optimal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kecamatan	82	83	90	91	91,50	92

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Puri Tahun 2025 mengacu pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah kabupaten Mojokerto yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri untuk 5 tahun mendatang yaitu **Mewujudkan Pelayanan Publik yang Optimal**. Untuk itu Program dan kegiatan yang ada juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu antara lain :

a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
 - 6) Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
 - 1) Pengadaan mebel
- b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
 1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
- c. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
 1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

**Tabel 3.2 (T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Mojokerto**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Puri

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Pnting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Unsur Kewilayaan								
7.01	Kecamatan								
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Puri	85(A)	2.741.447.000	APBD Kab		86(A)	3.618.775.745
		Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		7 Inovasi				7 Inovasi	
7.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai	Kec. Puri	100,00%	5.000.000	APBD Kab		100,00%	19.000.000
7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Puri	7 dokumen	2.500.000	APBD Kab		7 dokumen	9.500.000
	Rincian :								

	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			1 Paket	1.600.000				
	Belanja Perjalanan Dinas			9 OH	900.000				
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Puri	4 Laporan	2.500.000	APBD Kab		4 Laporan	9.500.000
	Rincian :								
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak			10 set	1.600.000				
	Belanja Perjalanan Dinas			9 OH	900.000				
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	Kec. Puri	92,00%	2.491.447.000			93,00%	3.173.025.745
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Puri	15 Orang / Bulan	2.491.447.000			15 Orang / Bulan	3.173.025.745
	Rincian :								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15 Orang / Bulan	2.491.447.000			15 Orang / Bulan	3.173.025.745
7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Puri		-				-
	Rincian :								
					-				-
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	Kec. Puri	82	-			82	20.000.000
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kec. Puri	-	-			15 Orang	20.000.000

7.01.01. 2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec. Puri	0	-			0	-
					-				-
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan	Kec. Puri	90,00%	83.560.000			90,00%	202.750.000
7.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	1 paket	3.000.000			1 paket	15.000.000
	Rincian :								
	Stopkontak, Lampu LED			1 paket	3.000.000				
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	1 paket	21.160.000			5 paket	100.000.000
	Rincian :								
	Kursi Rapat			30 Unit	21.160.000				
7.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	12 Paket	20.000.000			12 Paket	32.000.000
	Rincian :								
	Honor PPTK			1 OB	1.010.000				
	Belanja makanan dan minuman rapat			12 Paket	13.000.000				
	Belanja Mamin Jamuan Tamu			12 Paket	5.990.000				
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Puri	2 Paket	.500.000			2 Paket	9.000.000
	Rincian :								
	Foto copy, Cetak Map Dinas, Cetak Banner			2 Paket	3.500.000				

7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec. Puri	3 Dokumen	2.700.000			3 Dokumen	3.750.000
	Rincian :								
	Koran			12 Bulan	2.700.000				
7.01.01. 2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	Kec.Puri	12 Paket	24.200.000			12 Paket	24.000.000
	Rincian :								
	Honor PPTK			1 OB	1.010.000				
	ATK/Kertas/bahan komputer/benda pos			12 paket	23.190.000				
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Puri	12 Laporan	9.000.000			12 Laporan	19.000.000
	Rincian :								
	SPPD dalam/luar kota			75 OH	9.000.000				
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	Kec. Puri	90,00%	-			90,00%	-
7.01.01. 2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Sekcam, 2 KasubBag,5 Kasi)	Kec. Puri	-	-			-	-
	Rincian :								
	-			-				-	
7.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec. Puri	-	-			-	-
	Rincian :			-	-			-	-

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	Kec. Puri	100,00%	123.530.000			100,00%	124.000.000
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Puri	24 Laporan	51.530.000			24 Laporan	52.000.000
	Rincian :								
	Honor PPTK			1 OK	1.010.000				
	Listrik Kantor			12 Bulan	43.405.500				
	PDAM			12 Bulan	7.114.500				
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Puri	12 Laporan	72.000.000			12 Laporan	72.000.000
	Rincian :								
	Honor PPTK			3 OK	3.030.000				
	Tenaga Administrasi Kantor dan Tenaga Keamanan(5 orang)			5 orang	68.970.000				
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Kec.Puri	90,00%	37.910.000			90,00%	80.000.000
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Puri	2 unit	31.250.000			2 unit	37.000.000
	Rincian :								
	Honor PPTK			1 OK	1.010.000				
	BBM			970 liter	18.333.000				
	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional			1 Unit	9.750.000				
	pajak			1 Tahun	2.157.000				

7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kec.Puri	3 Unit	3.000.000			3 Unit	25.000.000
	Rincian :								
	perabot kantor			1 paket	3.000.000				
7.01.01. 2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kec.Puri	10 Unit	3.660.000			10 Unit	18.000.000
	Rincian :								
	Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll			10 unit	3.660.000				
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec.Puri	100,00%	19.000.000			100,00%	60.000.000
7.01.02. 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	Kec.Puri	1050 pelayanan	19.000.000			1100 pelayanan	60.000.000
7.01.02. 2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		-	-			-	-
	Rincian :								
7.01.02. 2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Puri	30 Laporan	19.000.000			30 Laporan	60.000.000
	Rincian :								
	PPTK			1 OB	1.010.000				
	Forum Konsultasi Publik			1 Kegiatan	3.072.100				

	Peningkatan Kapasitas Pelayanan			22 pegawai	14.340.700				
	Perabot Kantor			1 paket	577.200				
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	Kec. Puri	100,00%	181.000.000			100,00%	395.000.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Puri	23 Dokumen	181.000.000			23 Dokumen	395.000.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Puri	10 Dokumen	40.000.000			10 Dokumen	90.000.000
	Rincian :								
	Honor PPTK			3 OB	3.030.000				
	Evaluasi RAPERDES APBDES	Jumlah Dokumen		16 berkas	2.209.400				
	Evaluasi RAPERDES Pertanggungjawaban APBDES	Jumlah Dokumen		16 berkas	1.614.100				
	Penilaian Monev Lomba Aadmiistrasi Desa	Jumlah Dokumen		16 dea	18.814.100				
	Konferensi Desa	Jumlah Dokumen		4 kali	10.204.200				
	Asistensi Penyusunan RKP Desa	Jumlah Dokumen		16 desa	1.414.100				
	Monev Pelaksanaan Realisasi APBDES Semester I	Jumlah Dokumen		16 berkas	2.714.100				
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Puri	5 Dokumen	17.000.000			5 Dokumen	70.000.000
	Rincian :								
	honorarium PPTK			1 OB	1.010.000				

	monitoring dan evaluasi (BK Desa)	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	2.272.100				
	Musrenbang Kecamatan	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	10.175.050				
	Musrenbang tematik	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	3.542.850				
7.01.06. 2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Puri	5 Dokumen	37.000.000			5 Dokumen	110.000.000
	Rincian :								
	Honor PPTK			2 OB	2.020.000				
	Honor muspika	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	13.500.000				
	sppd pemantauan wilayah	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	1.600.000				
	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	3.110.625				
	Tayakuran dan Upacara HUT RI	Jumlah Dokumen			16.769.375				
7.01.06. 2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Puri	10 Dokumen	87.000.000			10 Dokumen	125.000.000
	Rincian :								
	Honorarium PPTK			4 OB	3.030.000				
	SAPI QURBAN	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	44.215.700				
	doa bersama toga	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	6.738.100				
	lomba pkk	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	9.518.800				
	pelatihan PKK	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	8.739.100				
	Pleno PKK	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	7.614.100				
	pemberdayaan LKD	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	7.144.200				
					2.941.447.000		-		4.073.775.745

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja (RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian rencana kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam rencana kerja mengemukakan secara eksplisit rencana kerja program dan kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Di samping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan OPD, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan OPD.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto tahun 2025, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1
REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2025
KODE SKPD : 4.01.03
NAMA SKPD : KECAMATAN PURI

NO	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	U/P	B/L	INDOKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB (Rp)	APBD PROV		USULAN APBN		
					OUTPUT	OUTCOME				SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/ DAK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	7	Unsur Kewilayaan												
	7.01	Kecamatan												
	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85(A)	Kec. Puri	2.741.447.000					
						Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi	Kec. Puri						
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai		100,00%	Kec. Puri	5.000.000					
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 dokumen	Kec. Puri	2.500.000					
		Rincian :												
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					1 Paket		1.600.000					

		<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				<i>9 OH</i>		<i>900.000</i>					
	7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Kec. Puri	2.500.000					
		<i>Rincian :</i>											
		<i>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak</i>				<i>10 set</i>		<i>1.600.000</i>					
		<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>				<i>9 OH</i>		<i>900.000</i>					
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,00%	Kec. Puri	2.491.447.000					
	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang / Bulan	Kec. Puri	2.491.447.000					
		<i>Rincian :</i>											
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>				<i>15 Orang / Bulan</i>		<i>2.491.447.000</i>					
	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kec. Puri	-					
		<i>Rincian :</i>											
								-					
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Indeks Profesionalitas (IP) ASN Perangkat Daerah	82		-					
	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-		-					

	7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		0		-					
									-					
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai Kebutuhan		90,00%	Kec. Puri	83.560.000					
	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 paket	Kec. Puri	3.000.000					
		Rincian :												
		<i>Stopkontak, Lampu LED</i>					<i>1 paket</i>		<i>3.000.000</i>					
	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 paket	Kec. Puri	21.160.000					
		Rincian :												
		<i>Kursi Rapat</i>					<i>30 Unit</i>		<i>21.160.000</i>					
	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	Kec. Puri	20.000.000					
		Rincian :												
		<i>Honor PPTK</i>					<i>1 OB</i>		<i>1.010.000</i>					
		<i>Belanja makanan dan minuman rapat</i>					<i>12 Paket</i>		<i>13.000.000</i>					

		<i>Belanja Mamin Jamuan Tamu</i>				<i>12 Paket</i>		<i>5.990.000</i>					
	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Kec.Pu ri	3.500.000					
		Rincian :											
		<i>Foto copy, Cetak Map Dinas, Cetak Banner</i>				<i>2 Paket</i>		<i>3.500.000</i>					
	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	Kec.Pu ri	2.700.000					
		Rincian :											
		<i>Koran</i>				<i>12 Bulan</i>		<i>2.700.000</i>					
	7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material			Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan	12 Paket		24.200.000					
		Rincian :											
		<i>Honor PPTK</i>				<i>1 OB</i>		<i>1.010.000</i>					
		<i>ATK/Kertas/bahan komputer/benda pos</i>				<i>12 paket</i>		<i>23.190.000</i>					
	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		9.000.000					
		Rincian :											
		<i>SPPD luar kota</i>				<i>4 OH</i>		<i>1.500.000</i>					
		<i>SPPD dalam kota</i>				<i>75 OH</i>		<i>7.500.000</i>					

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai Kebutuhan	90,00%		-					
	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (1 Sekcam, 2 KasubBag, 5 Kasi)	-		-					
		Rincian :											
		-				-							
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-		-					
		Rincian :				-		-					
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan	100,00%		123.530.000					
	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan		51.530.000					
		<i>Rincian :</i>											
		<i>Honor PPTK</i>				<i>1 OK</i>		<i>1.010.000</i>					
		<i>Listrik Kantor</i>				<i>12 Bulan</i>		<i>43.405.500</i>					
		<i>PDAM</i>				<i>12 Bulan</i>		<i>7.114.500</i>					

	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		72.000.000					
		<i>Rincian :</i>											
		<i>Honor PPTK</i>				<i>3 OK</i>		<i>3.030.000</i>					
		<i>Tenaga Administrasi Kantor dan Tenaga Keamanan(5 orang)</i>				<i>5 orang</i>		<i>68.970.000</i>					
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	90,00%		37.910.000					
	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit		31.250.000					
		<i>Rincian :</i>											
		<i>Honor PPTK</i>				<i>1 OK</i>		<i>1.010.000</i>					
		<i>BBM</i>				<i>970 liter</i>		<i>18.333.000</i>					
		<i>Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional</i>				<i>1 Unit</i>		<i>9.750.000</i>					
		<i>pajak</i>				<i>1 Tahun</i>		<i>2.157.000</i>					

	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		3 Unit		3.000.000					
		Rincian :												
		<i>perabot kantor</i>					<i>1 paket</i>		<i>3.000.000</i>					
	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		10 Unit		3.660.000					
		Rincian :												
		<i>Service Peralatan Kantor , Printer Laptop, AC dll</i>					<i>10 unit</i>		<i>3.660.000</i>					
	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100,00%		19.000.000					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan		1050 pelayanan		19.000.000					
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		-		-					
		Rincian :												

	7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Non Perizinan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan		30 Laporan		19.000.000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>PPTK</i>					<i>1 OB</i>		<i>1.010.000</i>					
		<i>Forum Konsultasi Publik</i>					<i>1 Kegiatan</i>		<i>3.072.100</i>					
		<i>Peningkatan Kapasitas Pelayanan</i>					<i>22 pegawai</i>		<i>14.340.700</i>					
		<i>Perabot Kantor</i>					<i>1 paket</i>		<i>577.200</i>					
	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100,00%		181.000.000					
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		23 Dokumen		181.000.000					
	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		10 Dokumen		40.000.000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>Honor PPTK</i>					<i>3 OB</i>		<i>3.030.000</i>					
		<i>Evaluasi RAPERDES APBDES</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>16 berkas</i>		<i>2.209.400</i>					

		<i>Evaluasi RAPERDES Pertanggungjawab an APBDES</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>16 berkas</i>		<i>1.614.100</i>					
		<i>Penilaian Monev Lomba Aadmiistrasi Desa</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>16 dea</i>		<i>18.814.100</i>					
		<i>Konferensi Desa</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>4 kali</i>		<i>10.204.200</i>					
		<i>Asistensi Penyusunan RKP Desa</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>16 desa</i>		<i>1.414.100</i>					
		<i>Monev Pelaksanaan Realisasi APBDES Semester I</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>16 berkas</i>		<i>2.714.100</i>					
	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		5 Dokumen		17.000.000					
		<i>Rincian :</i>												
		<i>honorarium PPTK</i>					<i>1 OB</i>		<i>1.010.000</i>					
		<i>monitoring dan evaluasi (BK Desa)</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>1 Dokumen</i>		<i>2.272.100</i>					
		<i>Musrenbang Kecamatan</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>1 Dokumen</i>		<i>10.175.050</i>					
		<i>Musrenbang tematik</i>			<i>Jumlah Dokumen</i>		<i>1 Dokumen</i>		<i>3.542.850</i>					
	7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		5 Dokumen		37.000.000					
		<i>Rincian :</i>												

		Honor PPTK				2 OB		2.020.000					
		Honor muspika			Jumlah Dokumen	1 Dokumen		13.500.000					
		sppd pemantauan wilayah			Jumlah Dokumen	1 Dokumen		1.600.000					
		kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum			Jumlah Dokumen	1 Dokumen		3.110.625					
		Tayakuran dan Upacara HUT RI			Jumlah Dokumen			16.769.375					
	7.01.06.2.01.12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 Dokumen		87.000.000					
		Rincian :											
		Honorarium PPTK				4 OB		3.030.000					
		SAPI QURBAN			Jumlah Dokumen	1 Dokumen		44.215.700					
		doa bersama toga			Jumlah Dokumen	1 Dokumen		6.738.100					
		lomba pkk			Jumlah Dokumen	1 Dokumen		9.518.800					
		pelatihan PKK			Jumlah Dokumen	1 Dokumen		8.739.100					
		Pleno PKK			Jumlah Dokumen	1 Dokumen		7.614.100					
		pemberdayaan LKD			Jumlah Dokumen	1 Dokumen		7.144.200					
		JUMLAH						2.941.447.000					

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2025 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Puri, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Kecamatan Puri, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Di dalam Penyusunan Renja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Kecamatan Puri Tahun 2025 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Demi tercapainya sasaran organisasi dan perbaikan di tahun yang akan datang, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Kecamatan Puri sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
2. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.
3. Menerapkan sistem *reward and punishment* terhadap seluruh karyawan dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan beban kerja.
4. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan OPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Renja Kecamatan Puri di atas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harap.

Mojokerto, September 2024

CAMAT PURI



NALURITA PRISWIANDINI, S.STP,M Med.Kom

Pembina Tk. I

NIP 19810402 199912 2 001